

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Achmad Ali. 2002. *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, Jakarta: Gunung Agung.

Ahmad Jais, Hartono. 2010. *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Arfin Hamid. 2017. Understanding the Characteristics of Dispute Settlement in Sharia Economic System. *Hasanuddin Law Review*, 3(2), 198-207.

Bryan A. Gamer, 2009. (Edition in Chief), *Black's Law Dictionary 9th Edition*, West Thomson Reuters, St. Paul.

Chistina Soerya, Rr. Yoeniarti Sasongko, Abdul Gofar, J.A. Alwahdy. 2001. *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.

Fachrizal Afandi. 2009. PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama, dalam Al-Qanun, *Arena Hukum*, Vol. 12 No. 2: 127-133

Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, no. 1 (2016): 27–40.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 134

Jimly Ashiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
- Undang-undang Nomor 2/PNPS/1962 tentang Larangan Organisasi- Organisasi yang Tidak Sesuai dengan Kepribadian Bangsa

## **C. PERATURAN PEMERINTAH**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku
- Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah
- Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: JA.5/23/13 Tahun 1953 tentang Badan Hukum Jemaat Ahmadiyyah Indonesia
- Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Jakarta 6 Desember 1967
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, Jakarta 17 Januari 2000
- Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek,

Jakarta 9 April 2002

Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam uji Materil Undang-Undang No.1/PNPS/1965

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

TAP MPR No.II/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

#### **D. KEPUTUSAN JAKSA AGUNG**

Keputusan Jaksa Agung Nomor.KEP-115/JA/10/1995 Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008

Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan(Bakorpakem)

Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-108/J.A/5/1984 Tentang Tim Pakem Keputusan Jaksa Agung Nomor.Kep-116/A/J.A/11/2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di Seluruh Indonesia.

#### **E. MAKALAH**

Andi Hamzah, Konsep dan Strategi Pembaruan kejaksaan Republik Indonesia, makalah yang diajukan pada Workshop Governance Audit of The Public Prosecutor Service, (tanggal 21-22, Tuban, Bali, Pebruari 2001)

Andi Hamzah, Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Makalah diajukan pada Seminar Menyambut Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2000, AULA JAM DATUN, (Kejaksaan Agung, 20 Juli 2000)

Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, (Bandung, 6 April 1999)

Engkus Ruswana, "Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum Dan HAM Yang Dialami Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum (2008)

Jamintel Kejagung, "Jaminan Perlindungan Hukum Dan HAM Untuk Kebebasan Beragama Dan Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaannya", makalah seminar Watimpres Bidang Hukum (2008)

Tanuwibowo, Budi Santoso. Makalah Seminar Nasional Agama

Khonghucu Dalam Perspektif Teologis, Legal, Sosio Kultural dan Spiritual, (Semarang, 2000)

**F. JURNAL**

Muwaffiq Jufri, "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Konstitusi, Vol 16. No. 2, Juni 2019, hlm. 288.